

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2018). Prinsip utama akuntansi sektor publik adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik, sekaligus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (Purwati et al., 2019). Fungsi utama akuntansi sektor publik mencakup pencatatan, pengolahan, pengendalian, dan pelaporan transaksi keuangan, serta penyajian informasi yang memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengelola sumber daya publik secara efektif.

Peran akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan, handal, dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk keperluan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi tersebut diperlukan untuk melakukan perencanaan keuangan, menghitung biaya program, serta penganggaran. Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian organisasi atau lembaga pemerintah. Sebagai alat



an, anggaran mengindikasikan target yang harus dicapai pemerintah, an sebagai alat pengendalian, anggaran menunjukkan alokasi aya publik yang telah disetujui oleh Lembaga pemerintah untuk

dibelanjakan (Arifin, 2017).

Ruang lingkup akuntansi sektor publik yaitu pemerintah dan organisasi sektor publik, pencatatan transaksi keuangan, pengukuran kinerja, pengelolaan aset publik, pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik, serta pengawasan dan audit (Purwati et al., 2019). Dalam hal pengelolaan aset, akuntansi sektor publik berperan sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan secara efektif. Hal ini sejalan dengan tujuan keuangan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, baik dalam penyediaan layanan publik maupun pengelolaan keuangan negara seperti gedung, infrastruktur, dan alat berat, memiliki nilai ekonomis dan strategis yang sangat tinggi, sehingga pengelolaannya membutuhkan perlindungan yang memadai. Sebagai bagian dari keuangan negara, pengelolaan BMN dituntut untuk dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, BMN tidak terlepas dari berbagai risiko kerusakan atau kehilangan akibat bencana alam, kebakaran, atau faktor lainnya yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Dalam menghadapi risiko tersebut, pengasuransian



menjadi salah satu solusi strategis yang dapat memitigasi dampak risiko dan melindungi nilai aset negara.

Salah satu bentuk perlindungan yang relevan dengan prinsip pengelolaan aset negara yang efektif dan efisien adalah melalui asuransi BMN. Mekanisme pengasuransian memungkinkan pemerintah untuk memitigasi risiko kerusakan atau kehilangan aset negara akibat bencana, kebakaran, atau risiko lainnya, tanpa harus mengalokasikan anggaran besar untuk perbaikan atau penggantian aset secara langsung. Dalam hal ini, akuntansi sektor publik memiliki peran penting sebagai sistem pencatatan dan pelaporan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk pembayaran premi asuransi, pengelolaan klaim, dan pelaporan hasil pengasuransian. Pengelolaan BMN melalui asuransi juga mendukung prinsip efisiensi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dengan melibatkan perusahaan asuransi, pemerintah dapat mengurangi beban keuangan yang muncul dari risiko tak terduga, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas. Selain itu, pengasuransian BMN sejalan dengan prinsip transparansi, di mana laporan akuntansi sektor publik mencatat seluruh transaksi terkait asuransi secara jelas dan dapat diaudit oleh pihak berwenang.

BMN merupakan kekayaan negara yang memiliki nilai ekonomis dan strategis tinggi. Aset-aset ini mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga keberlanjutannya harus dijamin (Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara). Untuk mengelola risiko kerusakan atau kehilangan aset, pemerintah menggunakan pengasuransian BMN sebagai mekanisme mitigasi. Asuransi BMN menjadi langkah penting untuk melindungi aset negara dari potensi kerugian akibat

kebakaran, atau risiko lainnya. Dalam konteks ini, akuntansi sektor publik sebagai penyedia informasi keuangan yang relevan untuk menentukan



nilai aset, prioritas asuransi, dan efektivitas perlindungan dan pengamanan BMN.

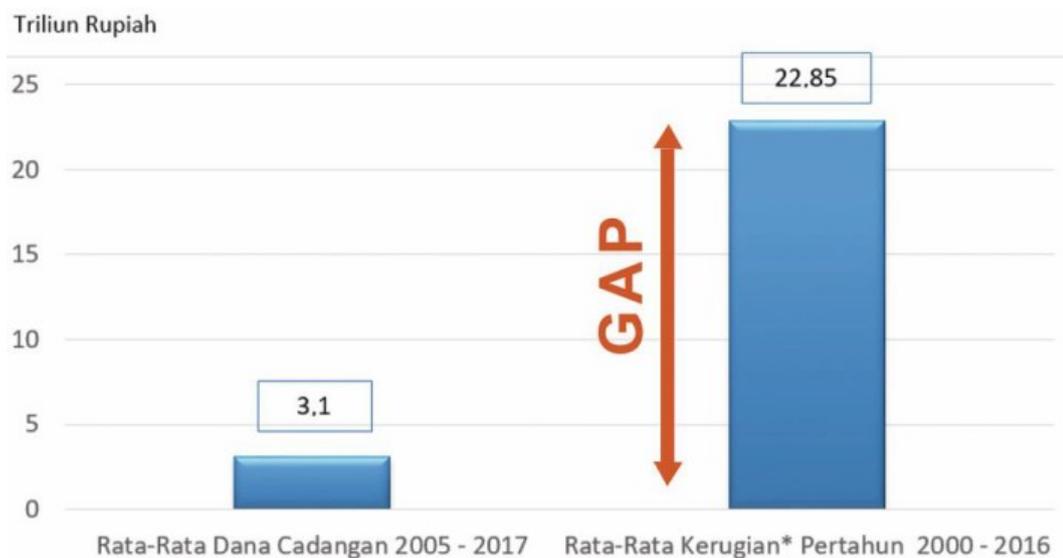
Salah satu risiko yang mengancam keamanan fisik Barang Milik Negara adalah tingginya potensi bencana di Indonesia baik karena faktor alam maupun sosial. Secara geografis Indonesia ini berada pada posisi yang dikenal dengan sebutan *ring of fire* (cincin api). Cincin Api merupakan garis pertemuan Lempeng Benua Asia dengan Lempeng Samudra India yang terletak disepanjang garis Pantai Selatan Indonesia. Posisi Indonesia juga berada di garis pertemuan antara Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia yang terletak di sepanjang Kepulauan Maluku. Kondisi inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak terdapat sesar dan gunung berapi serta memiliki potensi bencana alam dari gempa tektonik dan letusan gunung merapi sangat tinggi (Suprayitno & Soemitro, 2019).

Menurut *South Australian Government* (1999), manajemen risiko sangat penting bagi organisasi dalam melakukan mitigasi terhadap potensi risiko, termasuk melalui mekanisme transfer risiko. Tingkat risiko akibat bencana dapat berdampak signifikan pada posisi keuangan pemerintah, karena sebagian besar biaya terkait kesiapsiagaan dan pemulihan bencana, khususnya untuk memperbaiki infrastruktur publik yang rusak, ditanggung oleh pemerintah. Asuransi menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah, memperkuat kesiapan menghadapi bencana, serta memitigasi risiko yang berkaitan dengan pemulihan infrastruktur pemerintah (Ramos-Peralonso, 2023).

Kapasitas pemerintah untuk mendanai dampak besar dari bencana alam batas. Setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan anggaran cadangan sebesar rata-rata Rp3,1 triliun, sementara kerugian ekonomi tahunan dari tahun 2000 hingga 2016 mencapai Rp22,85 triliun. Hal ini



menciptakan kesenjangan pendanaan sebesar Rp18 triliun yang belum teratasi, sehingga Indonesia menghadapi risiko keuangan yang besar akibat bencana alam. Oleh karena itu, pembiayaan alternatif di luar APBN, seperti asuransi, sangat diperlukan untuk menjadikan Indonesia negara yang tangguh terhadap bencana. Gambar 1.1 menampilkan selisih yang jauh antara rata-rata dana cadangan yang dialokasikan dalam APBN untuk pembiayaan bencana, dengan rata-rata kerugian yang ditanggung pemerintah. Kapasitas pembiayaan APBN secara rata-rata mendekati atau di bawah 20% dari nilai kerugian ekonomi.



Gambar 1.1. Kesenjangan Pembiayaan Bencana tahun 2005-2017  
Sumber: (Kementerian Keuangan RI, 2018)

Pemerintah dapat mengasuransikan BMN yang terletak di daerah rawan bencana alam, yang dapat mempengaruhi pelayanan masyarakat jika BMN tersebut rusak atau hilang. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan BMN pendukung operasi pemerintahan. Pelaksanaan asuransi BMN di Indonesia di atur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Asuransi Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)



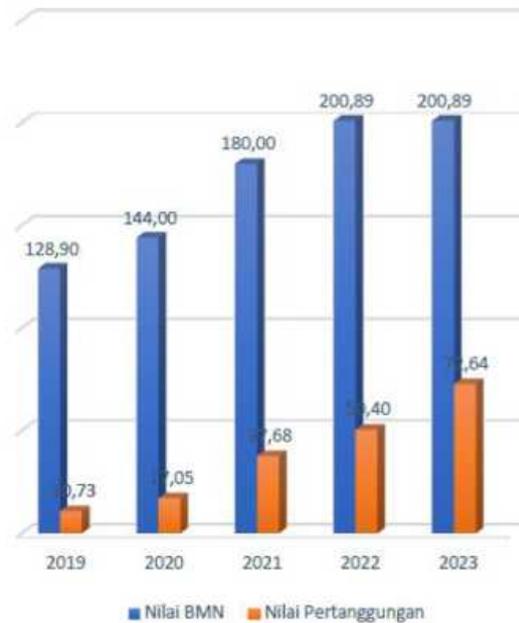
Nomor 118/KM.6/2020 mengenai Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga. BMN yang diasuransikan mencakup gedung atau bangunan yang digunakan sebagai kantor, fasilitas pendidikan, dan/atau fasilitas kesehatan, dengan syarat bangunan tersebut adalah bangunan permanen dalam kondisi baik. Lokasi obyek yang diasuransikan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pemerintah mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan negara dalam pengasuransian sebagaimana pasal 21 ayat 2 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 mengatakan bahwa Penyusunan anggaran untuk membayar biaya premi mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyusunan anggaran Kementerian/Lembaga (Pemerintah Indonesia, 2019). Aset properti pemerintah yang meliputi tanah dan bangunan merupakan sumber daya utama bagi organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu entitas yang dapat berjalan tanpa tanah atau bangunan (Tirayoh et al., 2021).

Dalam lima tahun terakhir, nilai pertanggungan BMN mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2019, nilai pertanggungan hanya mencapai Rp10,73 triliun, namun pada 2023 meningkat menjadi Rp72,64 triliun. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dibawah nilai total BMN yang seharusnya diasuransikan, yaitu Rp200,89 triliun. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp124,82 miliar untuk premi pada 2023, tetapi untuk mencakup seluruh BMN, diperlukan anggaran sebesar Rp394 miliar. Karena keterbatasan anggaran ini, pemerintah perlu menetapkan prioritas terhadap BMN yang paling penting untuk diasuransikan.



1.2 memperlihatkan bagaimana perbandingan realisasi nilai pertanggungan objek asuransi BMN dengan nilai perolehan BMN tahun 2019-

2023.



Gambar 1.2. Perbandingan Realisasi Nilai Pertanggungan Objek Asuransi BMN dengan Nilai Perolehan BMN Tahun 2019-2023  
Sumber : Miner *et al.*, 2012, halaman 38

Menetapkan prioritas asuransi BMN merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Salah satu tugas penting para pengambil keputusan adalah menentukan prioritas asuransi BMN, yang merupakan masalah kompleks karena melibatkan berbagai kriteria serta bobot yang beragam. Namun, hingga saat ini belum ada pedoman yang jelas untuk menentukan prioritas asuransi BMN tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pengambilan keputusan yang dapat membantu menyusun prioritas asuransi BMN berdasarkan kriteria-kriteria

dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk mewujudkan APBN yang efektif dan efisien.

Menurut Hansen dan Mowen (2013:7), Akuntansi manajemen adalah



proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan dan mengambil keputusan (Hansen & Mowen, 2013). Demikian juga menurut Menurut Eisenfuhr (Lunenburg, 2010) pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dapat kita katakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk memilih dari beberapa alternatif yang ada. Pengambilan keputusan disini dapat dikatakan sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses yang menghasilkan suatu pilihan di antara beberapa alternatif yang ada.

*Relevant cost* adalah konsep dalam akuntansi manajemen yang mengacu pada biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan, yaitu biaya yang berubah akibat pilihan tertentu dan memiliki implikasi di masa depan (Siddik, 2019). Dalam konteks penentuan prioritas Barang Milik Negara (BMN) untuk diasuransikan, teori *relevant cost* berperan penting karena memberikan dasar analisis ekonomi untuk memilih aset mana yang layak diasuransikan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas anggaran negara. *Relevant cost* berfungsi sebagai landasan dalam memahami komponen biaya dan manfaat terkait keputusan asuransi BMN. Biaya yang relevan dalam konteks ini meliputi: Premi Asuransi, Potensi Kerugian, dan dampak strategis seperti gangguan terhadap pelayanan publik akibat kerusakan atau kehilangan BMN.

Dalam pengambilan keputusan terkait asuransi, seperti menentukan Barang Milik Negara (BMN) yang perlu diasuransikan, organisasi akan pendekatan yang sistematis dan berbasis data untuk memastikan keputusan yang rasional dan efektif. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan



dalam pengambilan keputusan adalah Metode Bayes, Metode perbandingan eksponensial (MPE), Composite Performance Index (CPI), Analytical hierarchy process (AHP) (Rangkuti, 2011). Metode AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty merupakan teknik pengambilan keputusan multi-kriteria yang memungkinkan menggabungkan evaluasi obyektif dan subyektif dalam proses pengambilan keputusan (Saaty, 2004). Model pendukung keputusan ini menggambarkan masalah kompleks dengan banyak kriteria atau beberapa elemen dalam suatu hierarki. Hirarki didefinisikan sebagai struktur multi-level yang mewakili masalah yang kompleks. Level pertama adalah tujuan, kemudian level kriteria, sub kriteria, dan seterusnya hingga level alternatif terakhir (Natalia et al., 2021). AHP secara intuitif memberikan nilai bobot relatif untuk kriteria atau alternatif gabungan dengan melakukan perbandingan berpasangan menggunakan skala perbandingan berpasangan yang ditetapkan oleh Saaty (Malik & Haryanti, 2018; Sudradjat et al., 2020) (Achkasova, 2017). Berkaitan dengan penentuan prioritas BMN yang diasuransikan, setiap kriteria yang ditentukan dalam AHP melalui analisis biaya relevan digunakan untuk menyusun perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Contoh: nilai aset dibandingkan dengan risiko kerusakan, biaya premi dibandingkan dengan dampak strategis.

AHP telah menjadi salah satu metode pengambilan keputusan yang telah banyak digunakan di berbagai bidang selama kurang lebih empat puluh tahun (Pant et al., 2022). AHP digunakan untuk menentukan mahasiswa berprestasi (Munthafa et al., 2017), menentukan pemilihan mendaftar perguruan tinggi (Illa Dwi Pratiwi et al., 2024), menentukan jasa dekorasi rumah (Siregar, 2024), dan pembelian smartphone (Tuzzahrah et al., 2023), serta menentukan harga lelang pada proses pengadaan barang dan jasa (Waris et al., 2019).



Penelitian terdahulu di atas menggunakan metode AHP untuk menentukan keputusan. Namun, belum ditemukan penelitian yang menjadikan asuransi Barang Milik Negara sebagai topik pembahasannya. Padahal asuransi bencana yang masih terkait dengan instrumen keuangan juga merupakan instrumen yang sangat menarik untuk dieksplorasi. Masih terdapat beberapa celah penelitian mengenai topik *disaster risk financing and insurance*, mulai dari objek penelitian, instrumen keuangan yang dibahas, hingga metode dan teknik penelitian yang digunakan (Adhasara et al., 2022).

Adapun untuk menentukan prioritas asuransi BMN, maka terlebih dahulu perlu menentukan kriteria-kriteria yang penting sebagai dasar perhitungan prioritas asuransi BMN. Kriteria-kriteria tersebut ditentukan berdasarkan studi literatur yang berkaitan dengan asuransi dan resiko bencana. Belum ada penelitian yang dipublikasi di jurnal terkait penentuan kriteria dalam rangka prioritas asuransi barang milik negara. Namun, Sebagian perusahaan penyedia asuransi properti telah berpendapat bahwa kriteria penting untuk menentukan prioritas asuransi aset yaitu kategori aset yang penting (*critical*) (Claudia et al., n.d.). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang akan diukur dan dianalisis menggunakan metode AHP. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti cara penentuan prioritas asuransi barang milik negara menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) serta melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas asuransi barang milik negara berupa gedung/bangunan.



pengelolaan asuransi BMN memerlukan pendekatan yang terintegrasi prinsip-prinsip akuntansi manajemen, khususnya Teori Pengambilan in. Akuntansi manajemen merupakan cabang ilmu akuntansi yang

berfungsi menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis oleh manajer dan pengelola organisasi. Dalam konteks pengasuransian BMN, teori pengambilan keputusan menjadi relevan karena membantu menentukan alternatif terbaik berdasarkan analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*), risiko yang dihadapi, serta prioritas aset yang harus diasuransikan.

Teori Pengambilan Keputusan dalam akuntansi manajemen berfokus pada analisis informasi yang relevan untuk mendukung pemilihan alternatif keputusan yang paling optimal. Dalam penelitian ini, teori tersebut diterapkan untuk mengevaluasi prioritas pengasuransian BMN. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan asuransi BMN melibatkan analisis terhadap biaya relevan (*relevant cost*), seperti premi asuransi, serta manfaat potensial yang diperoleh, yaitu penggantian kerugian yang dicover oleh asuransi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan akuntansi manajemen untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam alokasi sumber daya, sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis data terkait prioritas pengasuransian BMN, sehingga dapat mendukung pengelolaan aset negara yang lebih optimal. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan perspektif baru tentang integrasi akuntansi manajemen dengan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam konteks mitigasi risiko melalui asuransi BMN. Prioritas pengasuransian BMN harus mempertimbangkan berbagai



masuk nilai strategis aset, tingkat risiko yang dihadapi, dan ketersediaan  
i. Dengan demikian, teori akuntansi manajemen memiliki peran penting  
nyediakan kerangka analisis untuk mengidentifikasi dan memilih aset-

aset yang layak diasuransikan berdasarkan kriteria yang objektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dengan konsep pengelolaan BMN, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi melalui penerapan teori akuntansi manajemen dalam konteks sektor publik.

### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang terdapat di latar belakang, dapat dibuat rumusan permasalahan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan prioritas Barang Milik Negara untuk diasuransikan dengan Metode *Analytical Hierarchy Process*?
2. Variabel apa saja yang menjadi skala prioritas pada penentuan BMN untuk diasuransikan menggunakan metode AHP?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penentuan prioritas Barang Milik Negara untuk diasuransikan dengan Metode *Analytical Hierarchy Process*.
2. Mengetahui variabel apa saja yang menjadi skala prioritas Asuransi BMN berdasarkan metode AHP.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan bagi instansi.



akademisi, penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang pengambilan keputusan multi kriteria, yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori manajemen risiko dengan mengintegrasikan berbagai

kriteria penting yang mempengaruhi prioritas asuransi. Penelitian ini dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas terkait metodologi *Analytical Hierarchy Process*, serta memberikan wawasan mengenai kompleksitas pengambilan keputusan di sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan aset pemerintah. Hal ini melengkapi literatur mengenai pengambilan keputusan sektor publik dan pengelolaan aset pemerintah.

2. Bagi instansi, Penelitian ini menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait penentuan prioritas asuransi barang milik negara. Membuat proses pengambilan keputusan mengenai prioritas asuransi barang milik negara menjadi lebih efisien. Sehingga dapat memberi andil bagi pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dengan menentukan objek mana yang perlu diasuransikan berdasarkan berbagai kriteria yang telah diidentifikasi. Penelitian ini membantu menetapkan prioritas berdasarkan nilai aset dan risiko sehingga anggaran asuransi dapat dialokasikan secara optimal yang diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah, mitigasi risiko yang lebih baik dengan membuat prioritas berdasarkan penilaian risiko yang komprehensif untuk menjamin aset pemerintah yang paling rentan terhadap kerusakan atau kehilangan terlebih dahulu. Penelitian ini dapat menjadi landasan pemerintah dalam memelihara dan melindungi aset negara lebih efektif, sehingga memperpanjang umur ekonomisnya dan menjamin kelancaran operasional. Penelitian yang memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan aset pemerintah dalam menghasilkan keputusan komprehensif dan dapat diterima oleh semua pihak,



gga dapat dijadikan sebagai perencanaan jangka panjang yang lebih baik dan menganalisis terperinci dan penentuan prioritas yang jelas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Akuntansi Manajemen

Menurut Ronald M. Copeland dan Paul E. Dascher, Akuntansi Manajemen adalah bagian dari Akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan guna perencanaan, proses informasi, pengendalian dan pengambilan keputusan (Copeland & Dachser, 1978). Menurut menurut Hansen Mowen, akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk pengguna internal. Akuntansi manajemen mengidentifikasi, mengumpulkan mengukur dan mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan dan mengambil keputusan (Hansen & Mowen, 2013). Adapun menurut Supriyono, akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian dan pengarahannya serta pengendalian” (Supriyono, 1991).

Akuntansi manajemen memiliki tiga tujuan utama yaitu, 1) menyediakan Informasi, Menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menghitung biaya layanan, produk, atau objek lain yang ditentukan oleh manajemen; 2) Mendukung Perencanaan, memberikan data yang berguna untuk proses perencanaan, an, evaluasi, serta perbaikan yang berkelanjutan; 3) Mendukung ilan Keputusan, menyediakan informasi yang mendukung proses ilan keputusan. Informasi akuntansi ini membantu manajer dalam



melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi manajemen membantu manajer mengoptimalkan biaya operasional, merencanakan anggaran yang efektif, dan membuat keputusan yang tepat

### 2.1.2. Relevant Cost

Dalam konteks asuransi aset, klasifikasi biaya berperan penting dalam menentukan strategi perlindungan aset dan pengalokasian dana untuk pembayaran premi asuransi. Klasifikasi biaya memungkinkan pemegang aset, baik individu maupun pemerintah, untuk membedakan jenis biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait asuransi. Salah satu pengelompokan biaya yang dapat diterapkan adalah berdasarkan relevansinya dalam keputusan asuransi, yang terdiri dari biaya relevan dan biaya tidak relevan (Hariyani, 2018).

Biaya relevan (*relevant cost*) adalah biaya yang berpengaruh langsung terhadap keputusan terkait perlindungan aset melalui asuransi dan harus diperhitungkan dalam analisis keuangan. Beberapa jenis biaya relevan dalam asuransi aset meliputi:

- a. *Imputed cost* – Biaya semu yang sering dipertimbangkan dalam perbandingan dan analisis biaya. Dalam konteks asuransi, ini dapat berupa nilai depresiasi aset yang diasuransikan atau estimasi biaya kerugian jika aset tidak diasuransikan.
- b. *Incremental cost* – Biaya tambahan yang muncul akibat pemilihan alternatif tertentu. Contohnya, jika sebuah bangunan BMN diasuransikan terhadap bencana, maka akan ada tambahan biaya premi yang perlu dikeluarkan,



tetapi di sisi lain, risiko finansial akibat bencana dapat diminimalkan.

- c. *Differential cost* – Biaya yang timbul akibat perbedaan antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Misalnya, membandingkan biaya premi asuransi dari berbagai perusahaan untuk mendapatkan perlindungan aset dengan cakupan terbaik dan biaya paling efisien.
- d. *Opportunity cost* – Biaya peluang yang muncul akibat pengambilan keputusan tertentu. Contohnya, jika dana yang tersedia digunakan untuk investasi lain dibandingkan membayar premi asuransi, maka ada risiko kehilangan perlindungan atas aset jika terjadi kerusakan atau kehilangan.

Pemahaman atas klasifikasi biaya ini memungkinkan pemerintah sebagai pemilik aset untuk mengevaluasi apakah suatu aset perlu diasuransikan berdasarkan nilai ekonomis dan tingkat risikonya. Dengan analisis biaya yang tepat, pemerintah dapat menentukan alokasi dana yang optimal untuk pembayaran premi asuransi tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Selain itu, pemahaman ini membantu dalam merancang strategi perlindungan aset yang efisien, sehingga risiko kerugian finansial akibat kejadian tak terduga dapat diminimalkan.

### 2.1.3. Asuransi

Istilah asuransi terdiri dari kata Belanda “*assurantie*” dan “*verzekering*” dan kata Inggris “*assurance*”. Kata-kata ini berarti “asuransi” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun dalam praktiknya, istilah asuransi dan tanggung jawab digunakan dalam bidang kegiatan usaha dan pendidikan hukum. Menurut Profesor R, istilah *verzekeraar* dan *verzekerde* dikenal juga dengan istilah hukum *verzekering*. Skardono menerjemahkan *verzekerer* sebagai pihak yang menanggung risiko, dan *verzekerde* sebagai tertanggung. Dalam hukum asuransi



atau pertanggungjawaban Inggris, perusahaan asuransi disebut insurer dan tertanggung disebut insured (Fathihatul, 2020).

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi diartikan sebagai segala kerugian, kerusakan, atau keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita tertanggung kepada tertanggung karena perusahaan asuransi menerima premi asuransi atas kerugian yang disebabkan oleh Penderitaan yang tidak diketahui disebabkan oleh kejadian tersebut. Berikut adalah unsur-unsur asuransi:

- Para Pihak Prinsipal

Pihak tertanggung yang mengadakan kontrak asuransi, yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung. Perusahaan asuransi wajib menanggung risiko yang dialihkan dan berhak menerima premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan.

- Status Pihak Perjanjian

Harus berstatus badan hukum berbentuk perseroan terbatas, perseroan terbatas, atau perkumpulan koperasi. Tertanggung mungkin berstatus perseroan, korporasi, atau persekutuan.

- Objek Asuransi

Objek asuransi meliputi objek, hak atau kepentingan yang melekat pada objek, dan jumlah yang disebut premi atau kompensasi asuransi.

- Peristiwa yang dipertanggungkan

Peristiwa yang dipertanggungkan adalah suatu perbuatan hukum yang berupa



kontrak atau perjanjian bebas antara perusahaan asuransi dan tertanggung  
di pokok pertanggungna.

- Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Tertanggung adalah suatu ikatan hukum yang timbul atas dasar suatu perjanjian atau perjanjian bebas.

Asuransi adalah kontrak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Kontrak asuransi merupakan imbalan atas pemberian ganti rugi kepada pemegang polis akibat kerusakan atau kehilangan dan menjadi dasar penerimaan premi asuransi (Hafidz Rafsanjani et al., 2022). Asuransi ini diambil oleh pengguna produk sebagai pemegang polis dan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium perusahaan asuransi, yaitu kumpulan perusahaan asuransi yang bertindak sebagai perusahaan asuransi pada saat menyelenggarakan asuransi BMN. Perusahaan yang tergabung dalam konsorsium asuransi adalah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### 2.1.4. Asuransi Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 1, No. 7, No. 97 Tahun 2019/PMK. 06/2019), asuransi adalah kontrak antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, dan merupakan dasar penerimaan hasil asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis terhadap segala kerugian, kerusakan, biaya-biaya yang timbul, hilangnya keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari terjadinya suatu kecelakaan premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi



imbalan atas penyediaan pertanggungan. Peristiwa yang tidak pasti. "Asuransi" yang dimaksud di sini adalah perusahaan yang terdaftar di Otoritas Pengatur Industri Jasa Keuangan Indonesia yang bergerak di bidang

asuransi umum. Masa asuransi BMN adalah satu tahun sejak berakhirnya kontrak.

Risiko adalah suatu ketidakpastian atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Dari sudut pandang asuransi, risiko adalah kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh suatu bahaya yang mungkin terjadi, namun kita tidak mengetahui terlebih dahulu apa atau kapan hal itu akan terjadi. Meski tidak selalu demikian, sebaiknya Anda sudah menyiapkan payung sebelum hujan. Oleh karena itu, Anda harus bersiap dan melakukan tindakan pencegahan sebelum suatu bahaya terjadi agar Anda dapat menyikapinya dengan tepat jika terjadi.

Kontrak asuransi adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi untuk membuktikan bahwa seseorang/perusahaan/badan hukum telah mengadakan kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi tersebut (Fathihatul, 2020). Dokumen ini memiliki peran penting dalam menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik tertanggung maupun perusahaan asuransi, dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Secara umum, kontrak asuransi mencakup beberapa elemen utama. Pertama, kontrak itu sendiri berisi ketentuan dan syarat yang mengatur hubungan antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Kedua, kontrak ini berfungsi sebagai bukti jaminan dari perusahaan asuransi kepada tertanggung, yang menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin dialami tertanggung akibat kejadian yang tidak terduga. Ketiga, kontrak asuransi juga mencakup kewajiban pembayaran premi oleh tertanggung sebagai bentuk kontribusi terhadap perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Dengan adanya kontrak asuransi, tertanggung mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan sementara perusahaan asuransi memiliki dasar hukum dalam kan layanan perlindungannya.



Undang-Undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 mendefinisikan premi asuransi sebagai jumlah yang ditetapkan oleh suatu perusahaan asuransi atau reasuransi dan harus dibayar oleh pemegang polis berdasarkan suatu kontrak asuransi atau reasuransi atau yang lain yang didefinisikan sebagai jumlah. Besaran manfaat yang diterima ditentukan berdasarkan peraturan hukum yang mendasari program asuransi wajib. Sedangkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. 06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan pengasuransian BMN dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum, dan/ atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pihak pelaksana penjaminan BMN terdiri dari dua pihak. yakni pengguna properti di K/L sebagai pemilik kontrak asuransi dan konsorsium asuransi BMN sebagai pihak yang memberikan perlindungan asuransi terhadap BMN yang dipertanggungkan (Pemerintah Indonesia, 2019).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. 06/2019, barang milik negara yang dapat dipertanggungkan adalah sebagai berikut:

1. Bangunan yang digunakan untuk keperluan perkantoran
2. Bangunan dan struktur yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan dan atau
3. Bangunan dan struktur yang digunakan sebagai fasilitas Kesehatan

Nilai Pertanggungkan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, hitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang gungkan ke dalam keadaan baru. Pertanggungkan asuransi yang



pengelolaannya menjadi tanggung jawab pengguna real estat atau agen pengguna real estat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13 Ayat 2 Peraturan No. 97. PMK. 06/2019 Menteri Keuangan tentang Penjaminan Barang Milik Negara yaitu apabila rusak atau hilang maka akan terganggunya pelayanan kepada masyarakat dan/atau mempengaruhi normalnya pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara. Lebih lanjut, Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. 06/2019 tentang Penjaminan Barang Milik Negara menyatakan bahwa benda yang dipertanggungjawabkan dengan asuransi berhak menambah nilai bangunan dan bangunan yang dipertanggungjawabkan menyatakan bahwa fasilitas yang dapat digunakan dapat disertakan (Pemerintah Indonesia, 2019). Sarana atau prasarana yang berkaitan antara lain:

- a. Komponen struktur seperti rangka dan pondasi
- b. Bagian mekanis seperti elevator, eskalator, dan pipa air dari bangunan tahun SM.
- c. Komponen kelistrikan seperti instalasi listrik dan sistem alarm kebakaran. dan/atau
- d. Elemen desain luar ruangan seperti teras, pagar, dan taman.

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat, sedangkan masa asuransi Barang Milik Negara adalah satu tahun sejak kontrak asuransi ditandatangani oleh pemegang polis dan dapat diperpanjang setelah berakhirnya jangka waktu tersebut. Asuransi BMN hanya digunakan untuk melaksanakan proyek pemerintah yang berkaitan



ujian asuransi BMN yaitu cakupan risiko atau kerugian yang optimal. yang disepakati ditetapkan berdasarkan tarif tetap oleh perusahaan

asuransi dan pemegang polis untuk menghindari kemungkinan penipuan dan persaingan harga, dan pemerintah diharuskan memberikan harga tetap serendah mungkin agar tidak membebani anggaran negara yang akan diterima.

### 2.1.5. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Proses yang dikenal dengan Analytical Hierarchy Process (PHA) atau Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam bahasa Inggris ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika di University of Pittsburgh (Wijaya et al., 2015). Sejak awal, AHP telah dipelajari secara luas dan telah menjadi teknik yang banyak digunakan dalam literatur (Nisel & Özdemir, 2016). Dalam penelitian lain, Apostolou dan Hassell (1993) mengulas makalah AHP dalam literatur akuntansi, dan menyajikan diskusi tentang AHP dan penerapannya dalam akuntansi sepanjang tahun (Apostolou & Hassell, 1993). Vaidya dan Kumar (2006) mengelompokkan referensi secara regional dan tahunan untuk melacak peningkatan penerapan AHP (Vaidya & Kumar, 2006). Liberatore dan Nydick (2008) menyajikan tinjauan literatur penerapan AHP dalam pengambilan keputusan medis dan perawatan kesehatan sejak tahun 1997 kemudian mengumpulkan artikel terkait yang muncul di jurnal internasional dari tahun 1997 -2006 dan meninjau literatur penerapan AHP terintegrasi. Makalah ini menyatakan bahwa pemrograman matematika, penerapan fungsi kualitas, meta-heuristik, analisis SWOT dan Analisis Envelopment Data (DEA) umumnya dikombinasikan dengan AHP dalam studi (Liberatore & Nydick, 2008).



AHP pada dasarnya dirancang untuk menangkap secara wajar persepsi yang terkait erat dengan suatu isu tertentu melalui prosedur yang

bertujuan untuk mengidentifikasi skala preferensi di antara serangkaian alternatif yang berbeda. Analisis ini bertujuan untuk membuat model masalah yang tidak terstruktur dan biasanya berhubungan dengan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (*judgment*), atau situasi atau situasi kompleks tanpa kerangka kerja, yang ditujukan untuk menyelesaikan situasi dimana data atau informasi statistik sangat terbatas atau kompleks. Ia tidak ada dan hanya bersifat kualitatif, berdasarkan persepsi, pengalaman, atau intuisi. AHP juga banyak digunakan untuk pengambilan keputusan multi-kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya, dan memprioritaskan strategi pemain dalam situasi konflik.

AHP didasarkan pada fakta dan pemikiran dasar yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemikiran analitis manusia, seperti:

- Pikiran manusia dapat membandingkan dua objek yang berbeda sehubungan dengan sifat-sifat umum mereka.
- Perbandingan berpasangan adalah cara paling akurat untuk mendapatkan prioritas relatif dari sekumpulan objek.
- Pemikiran manusia tidak konsisten, tetapi orang yang berpengalaman mempunyai pemikiran yang konsisten (terhubung secara logis). Inkonsistensi penting untuk pembelajaran, namun konsistensi lebih penting untuk pengambilan keputusan.
- Data kuantitatif mengenai permasalahan harus diubah menjadi data yang dapat diintegrasikan dengan informasi kualitatif lainnya yang diperlukan untuk perencanaan secara konsisten.

Data kuantitatif dalam bentuk mentah tidak dapat digunakan untuk tujuan n ditentukan dari pengukuran alami. Untuk alasan ini, Saaty menciptakan sar AHP dan berpendapat bahwa objektivitas lebih penting daripada



subjektivitas. Data kuantitatif mengenai permasalahan harus ditransformasikan menjadi data yang dapat diintegrasikan dengan informasi kualitatif lainnya yang diperlukan untuk merencanakan secara konsisten. Data kuantitatif dalam bentuk mentah tidak dapat digunakan untuk tujuan ini, namun ditentukan dari pengukuran alami. Untuk alasan ini, Saaty menciptakan skala dasar AHP dan berpendapat bahwa objektivitas lebih penting daripada subjektivitas.

#### a. Persiapan Hirarki

Persiapan hierarki ini merupakan tahap penerapan yang paling penting. AHP sebagai model permasalahan yang ingin dipecahkan. Menciptakan hierarki ini memerlukan pemikiran kreatif, pengumpulan informasi, penggabungan informasi, proses memori, perspektif orang lain, dan pengembangan. Pada kenyataannya, tidak ada prosedur yang seragam untuk membentuk tujuan, standar, dan elemen hierarki lainnya. Hirarkinya bersifat multilinear dan diurutkan dari atas ke bawah, dari elemen yang paling umum dan tidak dapat dikontrol hingga elemen yang spesifik dan dapat dikontrol.

#### b. Penetapan Prioritas

Persepsi pengambil keputusan terhadap prioritas ditentukan melalui serangkaian evaluasi komparatif lintas pasangan yang dilakukan dalam format matriks. Matriks perbandingan berpasangan ini diisi dengan nilai numerik yang mewakili kepentingan relatif suatu elemen terhadap elemen lainnya. Skala perbandingan berpasangan ini ditunjukkan pada Tabel 2.1. Skala ini mendefinisikan dan mendeskripsikan nilai dari 1 hingga 9 yang digunakan untuk membandingkan item pada setiap tingkat hierarki berpasangan dengan kriteria

kat di atasnya.

Tabel 2.1. Daftar Skala AHP dan Penjelasannya

Definisi	Penjelasan



1	Sama penting ( <i>Equal Importance</i> )	Kedua faktor tersebut memiliki dampak yang sama terhadap tujuan
3	Sedikit lebih penting ( <i>Slightly more Importance</i> )	Pengalaman dan penilaian cenderung memihak satu faktor dibandingkan faktor lainnya.
5	Jelas lebih penting ( <i>Materially more Importance</i> )	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
7	Sangat jelas penting ( <i>Significantly more Importance</i> )	Satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek
9	Mutlak lebih penting ( <i>Absolutely more Importance</i> )	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi
2,4 ,6, 8	Ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan ( <i>Compromise Value</i> )	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan
1/3 ,1/ 5,1 ,7, 1/9	Kebalikan	Misalnya A dibanding B menghasilkan 3, maka B dibanding A menghasilkan 1/3

Sumber : (Bunyan Unel & Yalpir, 2019)

Pada metode AHP terdapat prioritas sekumpulan kriteria atau alternatif ditentukan dengan membandingkan masing-masing kriteria, dan setiap kriteria diberi bobot dari skala terendah hingga tertinggi, yaitu 1 sampai 9. Secara relatif, berarti bahwa satu pilihan dibandingkan dengan pilihan lain untuk melihat yang paling penting dan seberapa penting pilihan tersebut. Dalam AHP,



penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan mengumpulkan persepsi masyarakat secara rasional dan mengubah faktor-faktor yang tidak berwujud (tidak terukur) menjadi aturan umum untuk perbandingan. AHP memiliki beberapa keunggulan yang ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kelebihan Analytical Hierarchy Process (AHP)

No	Kelebihan AHP	Keterangan
1.	Proses Pengulangan	AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pemahaman mereka melalui penggabungan
2.	Penilaian dan Konsesus	AHP tidak memaksakan konsesus tetapi mensistesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda – beda
3.	Tawar Menawar	AHP mempertimbangkan prioritas – prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan – tujuan mereka
4.	Sintesis	AHP memimpin kesuatu taksiran menyeluruh tentang setiap kelebihan alternatif
5.	Konsistensi	AHP menyinkronkan konsistensi logistik dari pertimbangan – pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas
6.	Pengukuran	AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan suatu metode untuk menetapkan suatu prioritas
7.	Penyusunan Hierarki	AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah - milah elemen - elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat yang berlainan dan mengelompokkan unsurunsur yang serupa dalam setiap tingkat
	Saling Ketergantungan	AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen – elemen dalam suatu sistem dan tak memaksakan pemikiran linier



9.	Kompleksitas	AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan permasalahan kompleks
10.	Kesatuan	AHP memberi satu model tunggal yang mudah Dipahami, mencakup berbagai macam persoalan yang tidak terstruktur

Sumber: (Purnomo et al., 2020)

## 2.2. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan uraian kajian yang diperoleh dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Beberapa peneliti yang telah melakukan kajian mengenai Penggunaan Analytical Hierarchy Process dalam menentukan suatu prioritas. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan metode AHP.

Penelitian dalam rangka menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi premi asuransi mobil di Perancis menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi premi asuransi mobil di Prancis meliputi jenis kendaraan, usia pengemudi, lokasi geografis, riwayat klaim, dan tingkat cakupan. Jenis dan model kendaraan mempengaruhi premi karena risiko pencurian yang berbeda serta biaya perbaikan, sementara pengemudi yang lebih muda dan kurang berpengalaman cenderung dikenakan tarif yang lebih tinggi. Area perkotaan biasanya memiliki premi yang lebih tinggi akibat risiko lalu lintas dan pencurian yang lebih besar. Riwayat klaim pemegang polis dan skor kredit mereka juga mempengaruhi penilaian risiko oleh perusahaan asuransi (Girard, 2024).

Penelitian mengenai keterkaitan antara variabel makroekonomi dengan asuransi dan klaim asuransi. Berdasarkan penelitian tersebut, Produk Bruto (PDB), inflasi, dan tingkat suku bunga memiliki hubungan positif signifikan dengan nilai premi, sedangkan nilai tukar uang menunjukkan



hubungan negatif (Rohman et al., 2023). Penelitian lain di China menemukan bahwa PDB merupakan faktor utama pendorong pertumbuhan premi asuransi properti di Cina, sedangkan investasi aset tetap mempunyai dampak signifikan terhadap premi asuransi properti Cina (You et al., 2014).

Penelitian yang mengevaluasi syarat dan status infrastruktur penting (*critical infrastructure*) di lima negara yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, dan Sri Lanka. Berdasarkan penelitian tersebut, infrastruktur penting adalah aset yang penting yang memberikan pelayanan signifikan kepada masyarakat pengguna. Kemudian terdapat keterkaitan antara infrastruktur penting dengan asuransi dimana penerapan asuransi sangat penting dalam rangka memulihkan kerugian dan kerusakan infrastruktur penting (Mukherjee et al., 2023).

Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No. 97 Tahun 2019/PMK. 06/2019 mengatakan bahwa BMN yang menjadi objek asuransi adalah BMN berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang dan/atau menunjang kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan. Kriteria tersebut mirip dengan definisi yang diberikan tentang infrastruktur penting sebelumnya (Mukherjee et al., 2023). Selanjutnya kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN yang berisi data BMN termasuk lokasi BMN, jenis resiko BMN, jangka waktu pengasuransian, identitas penyedia, nilai pertanggungan, besaran premi (Pemerintah Indonesia, 2019).

Penelitian mengenai Penentuan Skala Prioritas Tipe Rumah dengan Metode Analytical Hierarchy Process. Penelitian ini mengembangkan model asli

gan menambahkan beberapa variabel ekstensi yakni faktor keamanan, in hijau, kemudahan akses transportasi, desain rumah, sarana olahraga



dan dekat tempat pelayanan kesehatan. Berdasarkan uji konsistensi, tingkat prioritas tertinggi adalah rumah yang dekat dengan tempat pelayanan Kesehatan (Nurhayati, 2021).

Penelitian mengenai Model Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Perbaikan Produk Elektrikal dan Mekanikal dengan Metode AHP pada Industri Elektrikal dan Mekanikal. Penelitian ini menambahkan perluasan variabel yakni, biaya perbaikan, tingkat kesulitan perbaikan dan waktu pengerjaan barang. Keputusan prioritas perbaikan produk ini menghasilkan perangkungan dengan Consistency Ratio (CR) masing-masing normalisasi matriks tidak melebihi 0,1 atau 10% dan dapat dikatakan konsisten. Hasilnya menunjukkan Model SPK penggunaan metode AHP ini untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan lebih obyektif (Martono & Padeli, 2021).

Penelitian terkait Penentuan Skala Prioritas Pengembangan Smart Campus Menggunakan Metode AHP (Wirasta & Setiarini, 2021). Objek penelitiannya menggunakan komponen smart campus. Analisis data menggunakan metode AHP, yang dilakukan dengan studi literatur, penyebaran kuisisioner, perhitungan skala, dan penghitungan rekomendasi menggunakan perhitungan vektor eigen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan matriks kriteria dan matriks alternatif mampu menghasilkan pemeringkatan nilai, aspek people management system menjadi alternatif prioritas pertama sebesar 31%. Dengan demikian pendekatan level abstraksi mampu dihitung menggunakan model AHP untuk mendapatkan skala prioritas pengembangan smart campus (Wirasta & Setiarini, 2021).



Penelitian dengan judul Implementasi Metode Analytic Hierarchy Process pada Penetapan Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di

Kabupaten Lumajang. Variabel penelitiannya terdiri dari 3 aspek, aspek OPZ, Muzaki/Mustahiq dan aspek ruelas. Data dianalisis dengan melakukan uji konsistensi. Data dianggap konsisten dengan nilai rasio konsistensi (CR). Permasalahan yang paling prioritas adalah dari aspek OPZ dengan nilai prioritas sebesar 0.638425 dan solusi prioritasnya juga ditempati oleh cluster OPZ dengan nilai prioritas sebesar 0.581459 (Mustaan et al., 2023).

Penelitian terkait model matematika menggunakan prioritas AHP untuk seleksi pemain sepak bola. Analisis data menggunakan Sistem perangkat lunak yang disebut Expert Choice 11.0 digunakan untuk menentukan bobot prioritas. Dalam tulisan ini, pendekatan solusi dua fase diusulkan untuk pemilihan pemain sepak bola. Pada tahap pertama, atribut setiap pemain berdasarkan posisi masing-masing diprioritaskan menggunakan AHP. Pada tahap kedua, model pemrograman linier bilangan bulat 0-1 dikembangkan menggunakan bobot atribut pemain (Ozceylan, 2016).

Penelitian tentang model penentuan lokasi pangkalan laut menggunakan Metode AHP dan Set Covering Masalah. Pangkalan Angkatan Laut sebagai "Home Base" mempunyai lima kriteria fungsi mengikuti 5R, yaitu Istirahat, Penyegaran, Pengisian Bahan Bakar, Perbaikan dan Penggantian. Analisis data pada penelitian ini dihitung menggunakan metode AHP dan Set Covering dengan memasukkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner ke dalam software Expert Choice (Purnomo et al., 2020). Model AHP yang telah dibuat untuk menentukan lokasi pangkalan TNI Angkatan Laut menghasilkan Pengelompokan KAPAL PERANG dalam 3 kekuatan yaitu Pasukan Penyerang, Pasukan Patroli, dan Pasukan



ng dimaksudkan untuk memperlancar skala prioritas dalam penyiapan  
suai realitas fungsi tempur di lapangan dengan dukungan sesuai

fungsinya masing-masing.

Penelitian terkait Penerapan Metode AHP Dalam Pemilihan Supplier di PT. Qian Hu Joe Aquatic Indonesia. Hasil pengolahan data didapatkan kriteria yang paling diperhatikan perusahaan dalam pemilihan supplier secara berurutan yaitu: kualitas, harga, pengiriman, layanan dan terakhir hubungan supplier. Adapun supplier yang dapat dijadikan sebagai prioritas oleh perusahaan secara berurutan yaitu: supplier Catur dengan bobot 0,363, supplier Laksana Aquarium dengan bobot 0,316, supplier Jumali dengan bobot 0,315, supplier Rodi dengan bobot 0,301, dan prioritas kelima adalah supplier Argo dengan bobot 0,240 (Zendrato et al., 2023).

Penelitian terkait Penentuan Prioritas Penanganan Jalan di Kabupaten Kediri dengan Metode AHP. Ruas jalan di seluruh kecamatan pada kabupaten Kediri sebagai objek penelitian. Menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) instrument berupa program expert choice. Kriteria. Hasil dari program tersebut dipilih dari 15 ruas jalan di Kabupaten Kediri yang menjadi prioritas adalah ruas jalan Plosoklaten – Gedangsewu (Primaningtyas et al., 2022).

Penelitian penentuan prioritas infrastruktur jalan dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) Expert Choice Studi Kasus: Jalan Raya Demak-Godong. Analisis data menggunakan metode AHP dengan aplikasi Expert Choice. Hasil penelitian dapat diketahui faktor teknis yang mempunyai bobot tertinggi adalah faktor daya tahan terhadap cuaca sebagai prioritas dengan nilai 0,493, faktor non teknis yang mempunyai bobot tertinggi adalah faktor ketersediaan sumber daya dengan nilai prioritas 0,298 terhadap cuaca, 0,356 terhadap pergerakan tanah dan adap perubahan lalu lintas (Yuliani, 2020).



Penelitian penerapan Metode Analytical Hierarchy Process dalam

Penentuan Calon Nasabah Asuransi Kesehatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kemungkinan seseorang menjadi nasabah asuransi berdasarkan kriteria yang sering dijadikan indikator oleh agen asuransi sebelum menawarkan produk atau menawarkan jasa asuransi secara umum menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Hasilnya adalah kriteria pertimbangan yang dapat digunakan oleh agen asuransi dalam pengambilan keputusan penawaran produk asuransi kepada calon nasabah paling membutuhkan dan ideal sebagai nasabah dari asuransi yang ditawarkan dengan kriteria kepedulian, keuangan dan kesehatan (Siwy, 2023).

Penelitian tentang sistem pendukung keputusan kelayakan klaim asuransi menggunakan metode AHP. Sebagai hasilnya, sistem dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan kelayakan klaim yang diajukan nasabah lebih akurat dan membutuhkan waktu singkat (Islam et al., 2021).

